
ARTICLE

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19

Tini Maharani^{1*}, Nana Mulyana², Vina Karmilasari³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Maharani, T., Mulyana, N., Karmilasari, V., (2023). Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19. *Administrativa* 5(1)

Article History

Received: 17 Juni 2022

Accepted: 14 April 2023

Keywords:

Policy Strategy, UMKM, Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

The impact of the Covid-19 pandemic which has resulted in a decline in business activities in various sectors, one of which is the UMKM sector in the city of Bandar Lampung, where the UMKM sector plays an important role in economic progress in the city of Bandar Lampung. Therefore, an effective strategy is needed to overcome these problems. This study aims to determine the strategy of the Bandar Lampung City Cooperatives and UKM Office in increasing the business activities of UMKM actors after the Covid-19 pandemic, based on the strategic theory indicators by Richard P Remuld which there are 3 indicators, namely Diagnosis, Guiding Policies, and Coherent Actions by adjusting with the conditions at the Department of Cooperatives and UKM in Bandar Lampung and UMKM business actors. The method used is the technique of collecting data from observations, interviews, and documentation. The results showed that by paying attention to the research indicators there were obstacles regarding budget funds that made various activities not realized. Therefore the Department of Cooperatives and UKM Bandar Lampung has prepared strategies such as carrying out socialization activities, training, making capital assistance programs for UMKM business actors, as well as providing a forum for UMKM business actors to carry out their business activities.

Kata Kunci:

Strategi Kebijakan, UMKM, Pandemi Covid-19

ABSTRAK

Dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya kegiatan usaha di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor UMKM di kota Bandar Lampung, dimana sektor UMKM memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian di kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM pasca pandemi Covid-19, berdasarkan indikator teori strategi oleh Richard P Remuld yang terdapat 3 indikator yaitu Diagnosa, Kebijakan yang Memandu, dan Tindakan yang Runtut dengan menyesuaikan dengan kondisi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan pelaku usaha UMKM. Metode yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

* Corresponding Author

Email : ranimaharani130700@gmail.com

dengan memperhatikan indikator penelitian terdapat kendala mengenai dana anggaran yang membuat berbagai kegiatan tidak terealisasi. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah menyiapkan strategi seperti melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, membuat program bantuan permodalan bagi pelaku usaha UMKM, serta menyediakan wadah bagi pelaku usaha UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Di masa sekarang keberadaan UMKM telah berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk strategi untuk membantu pendapatan daerah maupun nasional. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan UKM, dimana perannya sangat penting dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Pengembangan koperasi dan UKM senantiasa dilakukan guna membantu pendapatan ekonomi daerah, hal ini karena keberadaan koperasi dan UKM berperan penting dalam meningkatkan ekonomi daerah maupun pusat. Namun saat ini karena adanya Pandemi Covid-19 yang membuat segala bentuk kegiatan sektor pemerintahan terhambat, hal ini tentunya berdampak terhadap laju pertumbuhan dan pendapatan daerah yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dampak pandemi juga dirasakan oleh pelaku UMKM di kota Bandar Lampung yang membuat pendapatan mereka menurun selama adanya pandemi.

Tabel 1. Persentase UKM yang Memiliki Laba Tahun 2016-2020

Tahun	UKM yang Memiliki Laba (%)	Jumlah (Rp)
2016	16,38 %	1.519.304.000
2017	16,67 %	1.699.819.200
2018	17,01 %	2.035.416.951
2019	16,85 %	1.949.539.793
2020	16,14 %	1.780.310.160

Sumber. Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung, dapat kita lihat bagaimana jumlah presentase pendapatan UMKM sebelum adanya Covid-19 sampai pada tahun 2020. Menurut data diatas jumlah persentase dari mulai masuknya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2019 menurun ke tahun 2020. Penurunan laba para pelaku usaha UMKM disebabkan oleh menurunnya kegiatan usaha yang menyebabkan jumlah penjualan juga menurun akibat kurangnya permintaan dari para konsumen yang menyebabkan pasar menjadi semakin sepi, Hal tersebut juga diakibatkan oleh adanya berbagai kebijakan Pemerintah yang semakin mempersulit aktivitas jual beli dipasar, dimulai dengan adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), hingga penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Akibat dari penerapan kebijakan – kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah membuat aktivitas pasar terhambat karena masyarakat sudah tidak dapat mengunjungi pasar secara langsung. Meskipun saat yang bersamaan terdapat beberapa pelaku usaha yang beralih usaha menggunakan internet (*online*) namun tetap tidak efektif untuk memulihkan pendapatan mereka.

Pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepannya seluruh pihak terkait dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya pandemi Covid-19. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan pada pelaku usaha UMKM seperti mengembalikan kegiatan usaha, meningkatkan kembali jumlah permintaan, meningkatkan kualitas produk, menarik pelanggan agar dapat memiliki *customer* seperti biasanya tentu memerlukan upaya dan oleh sebab itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memerlukan strategi-strategi yang lebih efektif sehingga dapat menghasilkan program ataupun kebijakan yang dapat menunjang ketidakstabilan kegiatan usaha pelaku UMKM di kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan salah satu teori untuk melihat indikator penilaian dalam pengendalian strategi Menurut Richard P. Rumelt (2012) dalam (Achmad, 2020) terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan tolok ukur dari bagaimana bentuk strategi yang efektif dan cukup “kredibel” untuk digunakan. Richard P. Rumelt (2012) mendefinisikan strategi yang baik mengandung 3 unsur inti yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung, alasan penulis memilih lokasi ini karena sebagai wadah dari pelaksanaan kegiatan UMKM dan segala bentuk ruang lingkup Koperasi dan UKM. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan juga primer dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah menetapkan 4 pokok strategi kebijakan dalam memulihkan kondisi UMKM, dimana 4 pokok strategi kebijakan tersebut tersusun dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang sudah disahkan pada dokumen Perdan RPJMD Kota Bandar Lampung periode 2021-2026.

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM yang telah dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
2. Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha
3. Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank.

4. Meningkatkan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif pada era perdagangan bebas/globalisasi

Berdasarkan 4 kebijakan tersebut Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagai bentuk dari upaya mencapai keberhasilan strategi diatas. Segala bentuk strategi kebijakan yang didukung dengan program kegiatan tersebut tentunya terdapat permasalahan, kendala yang menghambat tercapainya pelaksanaan strategi kebijakan. Didalam penelitian ini menggunakan Teori strategi oleh Richard P Remult (2012), dimana Richard mengemukakan bahwa strategi yang baik harus mengandung 3 aspek yaitu, diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren.

Pada mekanisme pertama yaitu dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan kegiatan usaha Pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid-19 ini mendapatkan permasalahan yang dilihat dari lingkup pelaku usaha UMKM langsung dimana dalam pelaksanaan strategi ini masih kurangnya sinergitas antara pemerintah kota dengan Dinas dan stakeholder terkait, pemerintah kota yang masih kurang menangani masalah ini secara serius sehingga dalam melaksanakan program kegiatan dan strategi kebijakan lainnya menjadi kurang maksimal.

Diagnosis ini berisi adanya permasalahan, faktor penghambat atau kendala dan faktor pendukung yang nyata dalam pelaksanaan strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan kegiatan usaha Pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid-19. Hambatan pertama yaitu kurangnya sinergitas oleh pemerintah. Kurangnya sinergitas yang dimaksud yaitu pemerintah kota ataupun Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam menerapkan kebijakan hanya berfokus pada UMKM yang lingkupnya sudah binaan dari pemerintah sendiri dan sudah memiliki tingkat usaha dilevel pemerintahan kota. Pada dasarnya pemerintah ataupun Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah mendata jumlah UMKM yang ada dikota Bandar Lampung, namun pada pengimplementasian program kebijakan bantuan hanya melihat UMKM yang sudah ada pada binaan.

Selanjutnya mekanisme kedua dalam indikator diagnosis ini mencakup hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan strategi kebijakan sebagai upaya meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Faktor penghambat yang menjadi kendala keberhasilan strategi kebijakan ini berasal dari dana anggaran yang kurang akibat menurunnya dana APBD serta pajak yang menurun selama Pandemi Covid-19. Dengan kurangnya dana anggaran membuat pemerintah harus melakukan *refocussing* anggaran sebagai bentuk upaya memilih program prioritas.

Refocussing ini dilakukan agar anggaran dapat digunakan untuk hal yang sifatnya lebih *urgent* di dalam pemerintahan. Dengan adanya hal ini terdapat kegiatan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi UMKM, pembinaan kepada para pelaku usaha UMKM yang terhambat dan tidak dapat dilakukan secara berkala atau rutin. Terdapat beberapa kegiatan yang berhasil direalisasikan namun kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD karena berasal dari pemerintah pusat. Sejauh ini masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM terus mengeluhkan tentang modal usaha mereka, kendala tidak adanya modal juga menghambat strategi ini. Oleh sebab itu kurangnya anggaran diatas juga tidak dapat membantu untuk memenuhi modal usaha para pelaku usaha, selain rendahnya permintaan konsumen para pelaku usaha juga sudah kesulitan memproduksi karena tidak adanya modal untuk membeli bahan baku selama Pandemi Covid-19 ini.

Di samping itu juga terdapat hambatan yang dialami oleh pelaku usaha UMKM yang masih mengeluhkan tentang kebijakan pemerintah, adanya kebijakan pemerintah menjadi upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 namun berdampak pada

semua sektor pemerintah. Pemberlakuan kebijakan membuat banyak pelaku usaha harus menerima keadaan dimana konsumen sepi, harga barang terus meningkat, jam operasional dikurangi bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang menutup usahanya.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud seperti dari penerapan awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seringkali adanya *lockdown* di daerah masing-masing hingga pada saat ini adanya penerapan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat kita ketahui bersama level PPKM dapat terus meningkat dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dengan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah membuat banyak sebagian pelaku usaha yang harus menutup usahanya. Disamping itu harga barang yang terus meningkat membuat pelaku usaha susah untuk menentukan harga jual, terlebih konsumen yang masih sepi membuat kegiatan usaha sangat terhambat.

Pada kebijakan penuntun yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung ini terdapat 4 poin kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan melalui berbagai bentuk kegiatan, program dan upaya untuk dapat membantu mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat dalam penerapan Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid-19 ini. Dibawah ini 4 poin kebijakan yang menjadi bagian dari strategi kebijakan penuntun, yaitu:

1. Mengoptimalkan kegiatan pemasaran bagi pelaku usaha UMKM di kota Bandar Lampung, pengoptimalan kegiatan pemasaran ini dilakukan untuk membantu meningkatkan pemasaran bagi pelaku usaha UMKM. Seperti halnya yang telah peneliti sampaikan pada indikator diagnosis bahwa keluhan dan permasalahan pelaku usaha diantara yaitu penjualan yang sepi, permintaan produksi dari konsumen berkurang, dimana dengan permasalahan ini Dinas Koperasi dan UKM perlu mencari solusi agar kegiatan pemasaran dapat kembali berjalan sehingga permintaan juga dapat kembali meningkat. Pengoptimalan kegiatan pemasaran bagi pelaku usaha ini nantinya akan diimplementasikan melalui berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.
2. Meningkatkan aksesibilitas koperasi UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga yang rendah, kebijakan ini memiliki tujuan untuk membantu pelaku usaha yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan modal. Permasalahan yang dialami pelaku usaha terhadap modal atau pinjaman namun bunga yang cenderung tinggi tentunya semakin menghambat keberlangsungan untuk melanjutkan kegiatan usahanya, oleh sebab itu pemerintah kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan membantu mengatasi permasalahan ini dengan membuat kebijakan untuk memberikan aksesibilitas koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan pembiayaan.
3. Meningkatkan fasilitas pendamping dalam mengembangkan produk UMKM agar dapat meningkatkan volume usaha bagi setiap pelaku usaha, dimana peningkatan fasilitas pendamping sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengembangkan produk UMKM dan meningkatkan volume usaha bagi pelaku usaha. Fasilitas pendamping ini dapat berupa penyediaan tempat untuk berjualan baik dalam bentuk peresmian lapak, kerjasama dengan perusahaan, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang telah peneliti sampaikan pada hasil indikator diagnosis, dimana terdapat faktor penunjang yang dapat membantu

pelaksanaan strategi Dinas Koperasi dan UKM yaitu dengan adanya narasumber dan sumber daya yang ada, dimana kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder lainnya juga sangat membantu mengembangkan produk UMKM dan meningkatkan volume usah

4. Mengoptimalkan kegiatan dan mendukung fasilitas program Kementerian, seperti yang kita ketahui dimasa pandemi Covid-19 ini terdapat banyak program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Stimulus ini tentunya dapat membantu meringankan keluhan masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM, oleh sebab itu stimulus atau bantuan ini tentunya harus disalurkan kepada pelaku usaha UMKM yang memang masuk dalam kategori syarat bantuan. Disamping itu juga harapanannya jenis stimulus yang disalurkan dapat disalurkan oleh seluruh pelaku usaha UMKM meskipun dengan jumlah yang kecil, karena sejauh ini banyaknya bantuan dalam bentuk kategori dan seleksi sehingga tidak semua pelaku usaha merasakan adanya stimulus tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan dalam indikator diagnosis, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berupaya mengatasi kendala tersebut dengan membuat strategi kebijakan dalam indikator Kebijakan Penuntun, yang dimana strategi kebijakan tersebut akan dilaksanakan pada indikator tindakan koheren. Tindakan koheren berisi aksi dan tindakan atau pelaksanaan, pengimplementasian dari berbagai kebijakan yang telah dibentuk sebagai bentuk upaya strategi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM pasca Pandemi Covid-19.

Untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang pertama yaitu dalam meningkatkan kegiatan pemasaran bagi pelaku usaha UMKM, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung diantaranya dengan senantiasa melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan, bazaar, dan berbagai macam kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam mempertahankan usahanya melalui kegiatan tersebut. Pelatihan dan pembinaan ini sudah dilakukan selama adanya Pandemi Covid-19 dan ditambah dengan kegiatan sosialisasi serta *gathering*. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu para pelaku usaha UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. Dalam kegiatan ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memberikan materi dan menyediakan *coach* untuk memberikan ide kepada para pelaku usaha agar dapat melakukan inovasi terhadap produk usaha mereka.

Pentingnya dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM dengan adanya kegiatan pelatihan, pembinaan dan kegiatan lainnya, karena dengan adanya kegiatan tersebut para pelaku usaha UMKM dapat melakukan inovasi dan mengembangkan usahanya, dengan adanya ide kreatifitas yang didapat selama pelatihan membuat para pelaku usaha dapat saling bekerjasama untuk terus membangun usaha mereka agar tetap berjalan dimasa Pandemi Covid-19 ini. Dibawah ini terdapat contoh kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk para pelaku usaha UMKM:

1. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dengan materi Koperasi Syariah dan Kelembagaan Koperasi
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Pelatihan Akuntansi Koperasi
4. Pelatihan *E-commerce*
5. Penyelenggaraan Promosi UKMSosialisasi gerakan sadar koperasi dikalangan generasi muda
6. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi, dan lain lain.

Selanjutnya Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung akan menerapkan pinjaman uang tanpa bunga, dimana masyarakat hanya membayar cicilan atau uang pokoknya dan bunga akan di subsidi langsung oleh pemerintah kota. Program ini akan segera di *launcing* pada tahun ini dan sudah selesai melakukan kerjasama dengan bank-bank terkait. Program ini dibuat sebagai upaya membantu mengatasi keluhan masyarakat khususnya pelaku usaha, dimana permasalahan yang selalu menjadi urgensi yaitu terkait modal untuk usaha.

Disamping itu juga fasilitas pendamping yang sangat menunjang pelaksanaan kebijakan ini yaitu dengan dibukanya *market place* yaitu dengan peresmian pembukaan taman wisata UMKM Bung Karno yang sangat menunjang untuk kegiatan usaha para UMKM, dimana kegiatan ini bentuknya *continue* yang akan terus dilaksanakan bahkan pada masa pasca pandemi nanti (pandemi usai). Taman wisata UMKM atau biasa disebut wisata kuliner ini resmi dibuka oleh Walikota Bandar Lampung Ibu Eva Dwiana pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021 di kawasan monumen patung Soekarno, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Terdapat sekitar 600 lapak dagang yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha UMKM, taman wisata UMKM ini akan menjadi sentra makanan dan kerajinan khas Lampung serta berbagai jenis UMKM lainnya yang akan digelar setiap pagi di akhir pekan yaitu pada hari Sabtu dan Minggu.

Taman wisata UMKM ini menjadi salah satu strategi pemerintah kota Bandar Lampung yang melibatkan Dinas Koperasi dan UKM langsung. Terdapat ratusan lapak yang dapat digunakan oleh pelaku usaha UMKM, namun hingga saat ini pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan yang ada di taman wisata UMKM merupakan pelaku usaha UMKM binaan yang ada dalam Dinas Koperasi dan UKM di kota Bandar Lampung. UMKM binaan sendiri merupakan kumpulan pelaku usaha yang jenis usahanya sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM, yang mana jenis usaha yang terdaftar merupakan kategori usaha yang sudah berorientasi luas pemasarannya.

Dengan dibukanya taman wisata UMKM ini harapannya dapat menjadi pembangkit semangat pelaku usaha UMKM lagi agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Tempat ini dinilai akan menjadi wadah memasarkan hasil produksi agar lebih efektif, dan kehadirannya tentu menjadi angin segar bagi pegiat usaha di Bandar Lampung. Selain itu, taman UMKM juga menyediakan gerai vaksinasi yang bisa dimanfaatkan warga yang belum melaksanakan vaksin Covid-19. Sejauh ini dengan dibukanya lapak berjualan yang ada di taman wisata UMKM Bung Karno kegiatan usaha para pelaku UMKM meningkat, dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara rutin pada hari Sabtu dan Minggu dengan adanya lapak berjualan masing-masing tentunya memudahkan pelaku usaha untuk menarik konsumen. Disamping itu kegiatan usaha pada setiap harinya juga tetap berjalan ditempat masing-masing para pelaku usaha, yang mana adanya lapak ini cukup membantu menyalurkan kegiatan usaha yang lebih luas dan tentunya diketahui oleh masyarakat sekitar.

Selanjutnya dalam penerapan kebijakan yaitu mengoptimalkan kegiatan dan mendukung fasilitas program Kementerian Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung telah menyalurkan program yang berasal dari pemerintah pusat berupa bantuan dana hibah seperti yang pertama program Ekonomi Kerakyatan (EKOR). Program EKOR merupakan salah satu pemberdayaan bagi UMKM terutama di kota Bandar Lampung yang dapat membantu para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya. Penyaluran berbagai program bantuan tersebut menjadi bentuk langkah yang telah dicapai Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM, berbagai program bantuan yang tidak hanya berasal dari pemerintah daerah namun juga banyak bantuan yang berasal dari pemerintah pusat yang telah disalurkan ke pelaku UMKM. Meskipun penyaluran

bantuan masih menggunakan kriteria dan syarat bantuan, namun harapannya bantuan-bantuan ini dapat disalurkan dengan baik serta membantu para pelaku UMKM.

Berdasarkan strategi-strategi diatas, dapat kita lihat berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk membantu meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM. Segala bentuk kebijakan yang dapat membawa dampak baik bagi masyarakat dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan sebuah kebijakan, oleh sebab itu pelaksanaan strategi diatas harus didukung dengan sikap dan peran pemerintah yang dapat sinergi melaksanakan berbagai program kegiatannya.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan usaha Pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid-19 sudah cukup baik. Berdasarkan Teori Richrad P Remult (2012) yang mendefinisikan bahwa strategi yang baik mengandung 3 unsur yaitu, Diagnosis, Kebijakan Penuntun dan Tindakan Koheren maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Diagnosis menjadi indikator yang paling penting dalam pembentukan sebuah strategi. Diagnosis mengandung permasalahan yang menjadi sumber dari kendala ataupun hambatan dalam melaksanakan sebuah strategi kebijakan, oleh sebab itu dengan memperhatikan indikator Diagnosis maka akan menghasilkan sebuah rencana kebijakan dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pembentukan kebijakan dilakukan untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pada saat melaksanakan Strategi dalam meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Terdapat permasalahan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan strategi kebijakan yaitu berupa permasalahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan, pemerintah yang kurang sinergitas dan penerapan strategi yang kurang efektif. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berupaya membuat kebijakan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan aksesibilitas dalam pembiayaan dan bantuan dana sebagai bentuk meningkatkan kegiatan pemasaran. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kegiatan usaha pelaku UMKM dengan adanya berbagai program kegiatan serta dukungan dari pemerintah yang memberikan wadah pemasaran untuk menyalurkan kegiatan pelaku usaha UMKM di Kota Bandar Lampung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kegiatan usaha Pelaku UMKM Pasca Pandemi Covid-19 diatas peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Pihak pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan sinergitas dengan Dinas Perdagangan guna untuk melakukan pemasaran yang berorientasi ekspor sehingga pemasaran mempunyai lingkup luas dan dapat meningkatkan kegiatan usaha pelaku UMKM serta meningkatkan daya saing global, yang mana salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan cara memperhatikan kualitas dari barang UMKM tersebut.
2. Para pelaku usaha UMKM di Kota Bandar Lampung dapat terus berupaya melakukan inovasi untuk mengembangkan usahanya, tidak hanya mengandalkan kegiatan pelatihan dan *gathering* yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM, namun dapat mengadakan kegiatan sendiri seperti mengadakan kegiatan pertemuan antar pelaku usaha pada 1 kali dalam

seminggu guna untuk melakukan kerjasama, bertukar ide dan saling mendukung dalam mengembangkan usaha.

REFERENSI

- Conny, S. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Abdul, H. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 162163.
- Achmad, S. (2020). Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian Dimasa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Kementrian Agama Cirebon. Jurnal Publika Unswagati Cirebon , 154.
- Evi, S. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Umkm (Studi Kasus : Home Industri Klepon Di Kota Baru Driyorejo). Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.8 Januari 2021 , 4-6.
- Fadhil, M. I. (2017). Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung. 4.
- Faedlulloh, D. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 2(2).
- Kasmira. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. 20.
- Putra1, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan. Jurnal Analisa Sosiologi , 6-7.
- Putri, W. K. (2021). Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Pendapatan Umkm Kuliner Di Kecamatan Alam Barajo Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi. 78.
- Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12 , 4.
- Satriani. (2017). Strategi Meningkatkan Patuh Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Mattaram Utara. 59.
- Shania, K. (2021). Kondisi Sosial Ekonomi Para Pelaku Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kel. Helvetia Timur. 81.

